

Tinjauan Umum

Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan

Perekonomian Indonesia 2018 tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait mampu mengawal ketahanan ekonomi dan mendorong berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diprakirakan lebih baik dengan ditopang struktur ekonomi yang berimbang dan kuat.

Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan dipicu ketidakpastian global yang meningkat. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, ketidakpastian global memberikan tantangan bagi pengelolaan ekonomi di sektor eksternal, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Tantangan dari jalur perdagangan makin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor untuk proyek infrastruktur domestik cukup besar, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam mengelola defisit transaksi berjalan pada level yang sehat. Dari jalur finansial, tantangan berkaitan dengan menurunnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tantangan dari global ini kemudian menurunkan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) terutama pada triwulan II dan III 2018, serta meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan diprioritaskan kepada upaya memitigasi risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu kinerja NPI, dan memberikan

tekanan pada nilai tukar, serta mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, strategi kebijakan tetap diseimbangkan dengan upaya untuk menopang berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan upaya ini, ruang penguatan kredit sebagai sumber pembiayaan perlu juga didorong dengan mempertimbangkan siklus finansial yang berada di bawah pola jangka panjangnya. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan ditempuh secara terukur agar inflasi tetap berada dalam kisaran sasarannya dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan moneter secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kebijakan pendalaman pasar keuangan ditempuh untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran turut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran.

Kebijakan Bank Indonesia disinergikan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Kebijakan fiskal ditempuh secara pruden untuk menopang stabilitas perekonomian dengan memperkuat prospek kesinambungan fiskal, dengan tetap mengoptimalkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Kebijakan juga ditopang peningkatan peran kebijakan fiskal daerah, penguatan proyek infrastruktur, dan percepatan berbagai kebijakan reformasi struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya dapat mengarahkan perekonomian Indonesia 2018 tetap berdaya tahan dan bertumbuh lebih baik. Berbagai indikator ekonomi pada triwulan IV 2018 menunjukkan perkembangan positif. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada akhir 2018 didorong daya tarik pasar keuangan domestik yang tinggi dan prospek perekonomian yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Impor juga mulai melambat pada triwulan IV 2018 sejalan dengan dampak kebijakan yang ditempuh, termasuk nilai tukar yang bergerak fleksibel. Impor yang melambat pada gilirannya dapat meminimalkan dampak mulai menurunnya ekspor terhadap risiko kenaikan defisit transaksi berjalan, yang secara keseluruhan 2018 tetap terkendali pada level sehat yakni 2,98% dari produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan positif tersebut kemudian mendorong NPI pada triwulan IV 2018 kembali mencatat surplus dan membawa Rupiah berada dalam tren menguat. Sementara itu, inflasi terkendali pada level rendah yakni 3,13%, dan dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Stabilitas sistem keuangan juga terjaga ditopang intermediasi perbankan yang naik, likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang tinggi, dan risiko kredit yang terjaga. Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi yang terkendali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 yang meningkat menjadi 5,17% ditopang permintaan domestik yang kuat.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap baik, meskipun terdapat beberapa tantangan dari global yang perlu terus dicermati. Tantangan dari global tetap terkait prospek pertumbuhan ekonomi dunia

yang melandai dan harga komoditas yang menurun, serta ketidakpastian pasar keuangan yang perlu terus mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 5,0%-5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Defisit transaksi berjalan diperkirakan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB dan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,5±1%. Prospek perekonomian yang baik pada 2019 menjadi basis bagi berlanjutnya penguatan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,5%-6,1% pada 2024. Defisit transaksi berjalan juga terus menurun hingga di bawah 2% dari PDB, serta inflasi yang makin rendah.

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas lain akan semakin solid guna memperkuat prospek perekonomian Indonesia tersebut. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter dan fiskal diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, dengan tetap memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Upaya memberikan stimulus perekonomian juga ditempuh kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, serta kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi kebijakan juga ditempuh untuk konsisten melanjutkan reformasi struktural sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Tantangan 2018 Tidak Ringan

Dinamika perekonomian Indonesia 2018 banyak dipengaruhi tiga ketidakpastian global. Ketidakpastian pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat terutama terlihat pada semester II 2018. Secara keseluruhan, ekonomi dunia 2018 tumbuh 3,7%, menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,8%. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dipengaruhi pertumbuhan kawasan Eropa dan Jepang seiring dengan permintaan eksternal yang berkurang dan permintaan domestik yang lemah. Pertumbuhan negara berkembang juga menurun dipengaruhi pertumbuhan Tiongkok dan Amerika Latin

yang melambat, meskipun pertumbuhan ekonomi India dan Timur Tengah meningkat.

Perekonomian dunia yang melambat berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat sejak semester II, sehingga secara keseluruhan tahun 2018 tercatat 3,7%, lebih rendah dari 4,7% pada 2017. Harga komoditas, termasuk harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet, juga dalam tren menurun, dengan penurunan yang dalam terjadi pada semester II 2018. Secara keseluruhan, pertumbuhan komposit harga ekspor Indonesia turun dari 21,7% pada 2017 menjadi terkontraksi 2,8% pada 2018. Sementara itu, harga minyak dalam tren meningkat hingga bulan Oktober 2018 untuk kemudian terkoreksi tajam sejak November 2018. Rerata harga minyak jenis Brent dan Minas masing-masing tercatat sama yaitu 71 dolar AS per barel pada 2018, meningkat dibandingkan dengan harga pada 2017 yang masing-masing sebesar 54 dolar AS per barel dan 52 dolar AS per barel.

Ketidakpastian global kedua bersumber dari kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS, Federal Funds Rate-FFR, yang lebih cepat dan lebih tinggi. Kenaikan FFR tidak terlepas dari upaya bank sentral AS (the Fed) untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi ke depan sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi AS yang melebihi pertumbuhan ekonomi potensialnya. The Fed pada 2018 telah menaikkan FFR sebanyak empat kali sebesar 100 *basis points* (bps), lebih besar dari respons kenaikan 2017 sebanyak 3 kali sebesar 75 bps, sekali pada 2016 sebesar 25 bps, dan sekali pada 2015 sebesar 25 bps. Dengan perkembangan ini, FFR pada akhir 2018 tercatat pada kisaran 2,25%-2,50%.

Bersamaan dengan pengaruh ekspansi fiskal AS, perkembangan FFR kemudian memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS hingga mencapai 3,24% untuk tenor 10 tahun. Arah pengetatan kebijakan moneter AS juga diperkuat oleh kebijakan penurunan posisi neraca bank sentral (*balance sheet reduction*) sebagai bagian dari proses normalisasi kebijakan kuantitas yang ditempuh saat krisis keuangan global 2008. Perkembangan ini memicu mata uang dolar menguat secara global tergambar pada indeks dolar AS yang meningkat dari 92,1 pada 2017 menjadi 96,2 pada 2018.

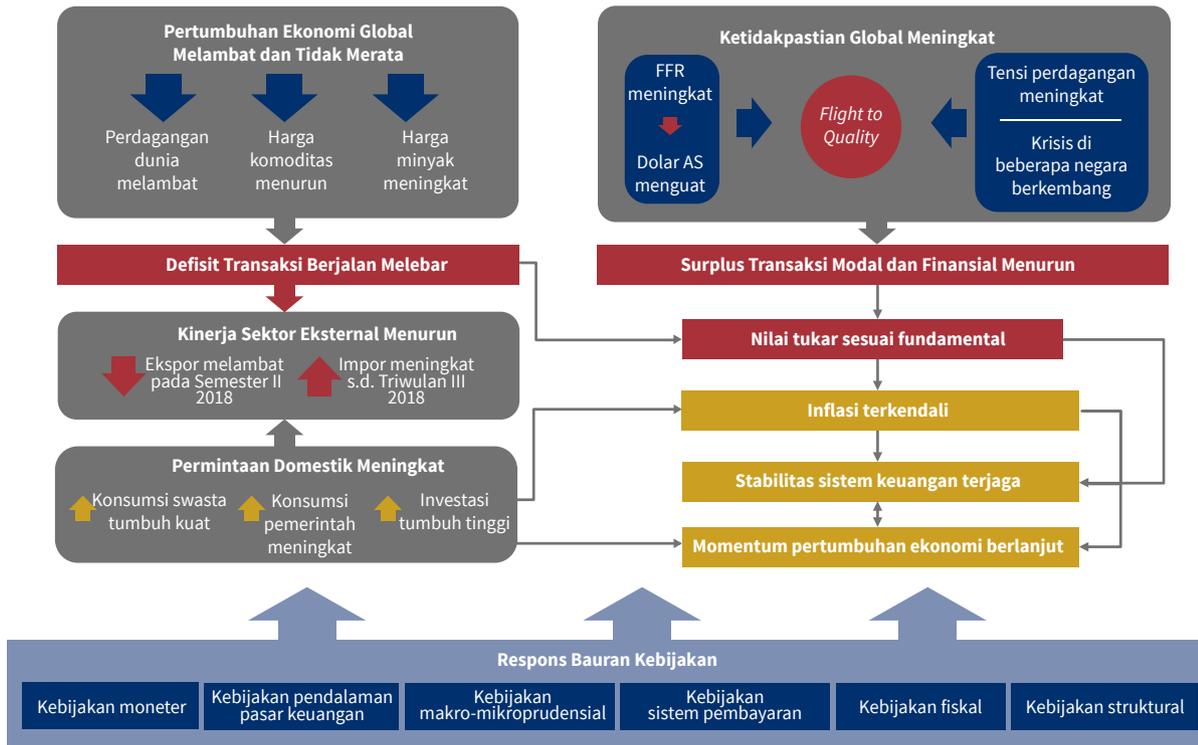
Ketidakpastian terakhir dipengaruhi kondisi pasar keuangan global yang bergejolak, yang meningkatkan premi risiko investasi ke negara berkembang. Kondisi pasar keuangan global ini dipengaruhi meningkatnya tensi hubungan perdagangan antara AS dengan beberapa negara mitra dagangnya, antara lain Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan kawasan Eropa. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi di Argentina dan Turki mendorong kenaikan sentimen negatif pada negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global juga dipengaruhi risiko geopolitik, antara lain, perundingan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa yang berlanjut, serta permasalahan ekonomi di Italia.

Perkembangan ketidakpastian di pasar keuangan pada gilirannya menurunkan kinerja pasar saham dan pasar obligasi di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global juga mendorong premi risiko investasi di negara berkembang tercermin dari peningkatan *volatility index* (VIX) dan J.P. Morgan *emerging market bond index* (JP EMBI).

Perkembangan global yang kurang menguntungkan tidak dapat dihindari dan memberikan tantangan pada sektor eksternal Indonesia, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial (Diagram 1). Dari jalur perdagangan, ketidakpastian global memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, khususnya mulai semester II 2018. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai, termasuk akibat penurunan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok, telah menurunkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Kinerja ekspor juga makin lemah karena pada saat bersamaan *terms of trade* Indonesia juga menurun akibat penurunan harga komoditas ekspor Indonesia.

Beberapa perkembangan menunjukkan kinerja ekspor Indonesia menurun pada semester II 2018. Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas pada triwulan III dan IV 2018 masing-masing tercatat 8,9% (yoy) dan kontraksi 1,9% (yoy), lebih rendah dari kinerja pertumbuhan pada semester I 2018 yang rata-rata sebesar 9,6% (yoy). Berdasarkan negara tujuan, penurunan ekspor nonmigas terlihat pada kontraksi ekspor nonmigas pada triwulan IV 2018 ke beberapa mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Filipina. Sementara itu, berdasarkan komoditas ekspor, penurunan ekspor nonmigas, terutama

Diagram 1. Transmisi Dinamika Global ke Ekonomi Indonesia



pada produk primer pada triwulan IV 2018, seperti *crude palm oil* (CPO) dan karet olahan. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan nilai beberapa ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan CPO pada 2018 tercatat 17,1% dan kontraksi 10,7%, menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 40,6% dan 28,9%.

Tantangan dari jalur perdagangan semakin kompleks karena pada saat bersamaan impor tetap kuat sampai dengan triwulan III 2018 sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi, khususnya untuk kegiatan proyek infrastruktur. Sampai dengan triwulan III 2018, rata-rata pertumbuhan nilai impor nonmigas cukup tinggi yakni sekitar 23,4% (yoy). Kenaikan impor terjadi di semua komponen, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor barang modal (29,3%), diikuti dengan barang konsumsi (26,8%) dan bahan baku (18,6%). Peningkatan impor bahan baku terutama dalam bentuk bahan baku yang digunakan industri untuk mendukung aktivitas produksi baik untuk konsumsi domestik maupun berorientasi ekspor. Sementara itu, impor migas pada tiga triwulan pertama 2018 juga tercatat tinggi yakni 21,9 miliar dolar AS, meningkat

35,0% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi permintaan domestik yang tetap kuat dan tren kenaikan harga minyak dunia.

Ekspor yang menurun pada semester II 2018 dan impor yang tinggi sampai dengan triwulan III 2018 memberikan tantangan pada upaya pengendalian defisit transaksi berjalan. Defisit neraca transaksi berjalan melebar pada triwulan II dan III 2018, masing-masing mencapai 3,0% dan 3,3% dari PDB. Faktor lain yang memengaruhi defisit transaksi berjalan yang melebar adalah kenaikan pembayaran jasa transportasi barang (*freight*) sejalan dengan impor barang yang meningkat. Defisit jasa transportasi pada tiga triwulan pertama 2018 meningkat dari 4,7 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 6,4 miliar dolar AS pada 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran jasa *freight* yang naik sejalan dengan aktivitas impor yang meningkat.

Dari jalur finansial, ketidakpastian global memengaruhi aliran masuk modal asing ke Indonesia. Kenaikan FFR menurunkan daya tarik aset di negara berkembang, sehingga mendorong pembalikan aliran modal asing

dari negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global yang menaikkan premi risiko investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia, juga memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Perkembangan ini pada gilirannya menurunkan kinerja transaksi modal dan finansial (TMF) pada triwulan II dan III 2018. Surplus TMF pada dua triwulan tersebut masing-masing tercatat 3,3 dolar AS dan 3,9 dolar AS, menurun dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya.

Defisit transaksi berjalan yang melebar dan surplus TMF yang menurun berkontribusi pada menurunnya kinerja NPI triwulan II dan III 2018, serta berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. NPI pada triwulan II dan III 2018 mencatat defisit cukup besar yakni masing-masing 4,31 miliar dolar AS dan 4,39 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar bersumber dari penurunan aliran masuk modal asing. Sejalan dengan dinamika NPI tersebut, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan pada triwulan II dan III 2018. Secara rata-rata, Rupiah pada triwulan II dan III 2018 masing-masing mencatat depresiasi 2,7% dan 4,5%, sehingga ditutup pada level Rp14.902 per dolar AS pada akhir September 2018.

Penurunan aliran masuk modal asing pada triwulan II dan III 2018 juga mempengaruhi kondisi likuiditas domestik. Meskipun tetap dalam level yang aman, penurunan aliran masuk modal asing berkontribusi pada penurunan pertumbuhan likuiditas perekonomian, M1 dan M2 masing-masing tumbuh menjadi 8,2% dan 6,7% pada September 2018, dari semula 12,4% dan 8,3% pada akhir 2017. Pertumbuhan M2 yang melambat dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan uang kuasi yang pada September 2018 tercatat 6,3%, menurun dari akhir 2017 sebesar 6,9%. Sejalan dengan kondisi ini, posisi penempatan bank pada instrumen operasi moneter Bank Indonesia juga menurun, dari semula 471,2 triliun Rupiah pada akhir 2017 menjadi 302,0 triliun Rupiah pada September 2018. Meskipun menurun, posisi penempatan bank pada instrumen operasi moneter Bank Indonesia tetap mencerminkan level kecukupan likuiditas yang memadai.

Di tengah tekanan terhadap keseimbangan eksternal, perkembangan keseimbangan internal dan stabilitas sistem keuangan tetap kondusif. Sampai dengan triwulan

III 2018, pertumbuhan ekonomi tetap solid ditopang oleh permintaan domestik. Kuatnya permintaan domestik terutama didorong dampak berlanjutnya proyek infrastruktur yang kemudian memberikan dampak pengganda kepada konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan dan nonbangunan. Sampai dengan triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% *cumulative to cumulative* (ctc). Kondisi keseimbangan internal yang baik juga tergambar pada perkembangan inflasi yang terkendali. Pengaruh pelemahan Rupiah tidak memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi, dimana sampai dengan September 2018 inflasi tercatat 2,88% (yoy). Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditandai dengan permodalan yang tinggi, kredit yang meningkat, dan risiko kredit yang terjaga rendah.

Sinergi Kebijakan Ditempuh

Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Dalam konteks pendekatan keseimbangan eksternal dan internal, tantangan perekonomian 2018 banyak mengemuka dari sisi keseimbangan eksternal, sedangkan keseimbangan internal dalam kondisi solid. Oleh karena itu, arah kebijakan difokuskan untuk memitigasi risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu kinerja NPI dan memberikan tekanan pada nilai tukar. Perkembangan ini perlu diantisipasi segera karena bila berlanjut dapat mengganggu stabilitas perekonomian.

Kebijakan juga diarahkan untuk menopang berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dalam tren meningkat, belum mengganggu keseimbangan internal mengingat posisinya di bawah kapasitas potensial. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan juga diupayakan untuk tetap menopang pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkat menuju kapasitas potensial perekonomian. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga konsisten dengan kondisi siklus finansial yang terindikasi berada di bawah pola jangka panjangnya, meskipun juga sudah dalam tren meningkat. Secara keseluruhan, bauran kebijakan pada akhirnya juga seimbang dengan upaya menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam

kisaran sasarannya dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Bauran kebijakan ditempuh melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lainnya. Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia juga disinergikan dengan kebijakan pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan struktural, dan kebijakan OJK untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan.

Arah suku bunga kebijakan moneter pada 2018 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang optimum untuk negara dengan perekonomian terbuka. Formulasi suku bunga kebijakan secara independen ditempuh dengan mempertimbangkan dua elemen penting lainnya yakni aliran modal asing yang bergerak bebas dan nilai tukar yang tetap fleksibel. Sejalan dengan kerangka ini maka, satu sisi, suku bunga kebijakan diarahkan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di aset pasar keuangan domestik. Sisi lain, suku bunga kebijakan juga terus konsisten dengan upaya menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental, sehingga menjadi piranti untuk peredam gejolak perekonomian dari eksternal.

Selaras dengan kerangka kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah *pre-emptive* kenaikan Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) berkaitan dengan respons Bank Indonesia yang *forward looking* dan antisipatif terhadap risiko kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Respons yang *front loading* bermakna besaran kenaikan suku bunga kebijakan telah memperhitungkan kemungkinan besaran kenaikan FFR sedemikian rupa sehingga perbedaan suku bunga yang terjadi akan tetap besar mempertahankan daya tarik aset domestik. Sementara itu, respons yang *ahead of the curve* berkaitan dengan kondisi besaran kenaikan suku bunga kebijakan

juga mengantisipasi kenaikan suku bunga negara berkembang lain sehingga daya tarik pasar keuangan domestik juga tetap kompetitif.

Dengan mempertimbangkan prospek perekonomian di tengah ketidakpastian global yang berisiko mengganggu ketahanan eksternal Indonesia, suku bunga kebijakan moneter BI7DRR dinaikkan hingga 175 bps untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dan menurunkan defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia secara bertahap sejak Mei 2018 menaikkan BI7DRR hingga menjadi 6,00% pada 2018. Berdasarkan dinamika triwulanan, BI7DRR naik 100 bps pada triwulan II 2018. Dalam periode ini, khususnya Juni 2018, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sampai 50 bps dengan pertimbangan ketidakpastian global yang makin tinggi dipicu kenaikan FFR yang diperkirakan lebih agresif, harga minyak yang meningkat, dan ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok. Selanjutnya, suku bunga kebijakan naik 50 bps pada triwulan III 2018 dan 25 bps pada triwulan IV 2018.

Kebijakan nilai tukar diarahkan agar Rupiah tetap bergerak fleksibel sesuai dengan nilai fundamentalnya dan mengikuti bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi Rupiah bila diperlukan ditempuh untuk meminimalkan volatilitas yang meningkat di tengah periode ketidakpastian global, yang dikhawatirkan akan memengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi. Kebijakan stabilisasi Rupiah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, melalui strategi optimalisasi intervensi ganda (*dual intervention*) di pasar valas dan di pasar surat berharga negara (SBN). Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. Kedua, melalui pengelolaan likuiditas valas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas. Kebijakan juga ditopang upaya pendalaman pasar valas melalui pengembangan instrumen lindung nilai seperti *overnight index swap (OIS)*, *interest rate swap (IRS)*, dan *domestic non-deliverable forward (DNDF)*.

Arah kebijakan moneter ditopang strategi operasional kebijakan moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Kebijakan ditempuh mempertimbangkan penurunan aliran masuk modal asing akan mengurangi likuiditas pasar uang dan perbankan, dan berisiko memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan arah operasional kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia pada triwulan II dan

III 2018 menempuh beberapa strategi untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang dan pasar valas di tengah tekanan global yang meningkat. Dalam periode ini, Bank Indonesia menambah frekuensi lelang instrumen *reverse repo* surat berharga negara (RR SBN) berjangka pendek, yaitu tenor 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan.

Bank Indonesia juga melakukan optimalisasi instrumen RR SBN dalam operasi pasar terbuka (OPT). Selain untuk menjaga kecukupan likuiditas, strategi ini juga bertujuan untuk memperkuat langkah penggunaan SBN sebagai instrumen OPT, mendorong konsolidasi pasar surat utang, dan meningkatkan pendalaman pasar uang. Selain itu, untuk mendukung upaya meningkatkan aliran modal masuk, Bank Indonesia juga menempuh reaktivasi lelang sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk tenor 9 bulan dan 12 bulan pada Juli 2018.

Pada triwulan IV 2018, strategi operasi moneter mulai diarahkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Arah kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan stabilitas perekonomian yang kembali terkendali sehingga memberikan ruang bagi implementasi strategi ini. Pada periode ini, Bank Indonesia menerapkan penguatan operasi moneter dengan membuka akses yang lebih luas bagi perbankan dalam meningkatkan likuiditas. Strategi ditempuh dengan tetap melanjutkan penguatan operasi moneter yang diterapkan pada periode sebelumnya, termasuk *fine tune operation* dan lelang *foreign exchange (FX) swap*.

Strategi operasional kebijakan moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas diperkuat dengan kebijakan peningkatan porsi giro wajib minimum (GWM) rata-rata. Pada 2018, porsi GWM rata-rata dua kali ditingkatkan yakni pada Juli 2018 dari 1,5% menjadi 2% dan kembali ditingkatkan pada Desember 2018 menjadi 3%. Bersamaan dengan strategi untuk menjaga kecukupan likuiditas, Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen keuangan syariah berupa sertifikat deposito berbasis syariah dan sukuk Bank Indonesia (SukBI).

Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan otoritas negara lain dan lembaga internasional untuk meningkatkan ketahanan eksternal. Pada 2018, Bank Indonesia memperkuat kerja sama *bilateral swap*

arrangement (BSA) dengan Bank of Japan (BoJ), sehingga dapat melakukan transaksi swap Rupiah dengan dolar AS dan/atau yen Jepang, dari sebelumnya yang hanya dengan dolar AS. Bank Indonesia dengan the People's Bank of China (PBoC) juga melakukan penguatan *bilateral currency swap arrangement* (BCSA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara, serta membantu menyediakan likuiditas jangka pendek untuk stabilisasi pasar keuangan. Kerja sama juga dilakukan Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) yang memungkinkan kedua negara memperoleh likuiditas jangka pendek melalui pertukaran mata uang lokal. Kerja sama juga dilakukan dengan otoritas negara Malaysia dan Thailand terkait penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement/LCS*) dalam transaksi perdagangan bilateral. Selain itu, Bank Indonesia juga memperpanjang kerja sama BCSA dengan Reserve Bank of Australia (RBA) yang ditujukan untuk mendukung transaksi perdagangan dan dapat digunakan juga untuk tujuan lain sesuai kesepakatan.

Untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia juga mempererat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat (TPIP) dan di tingkat daerah (TPID). Dalam strategi ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah di tingkat pusat dan daerah bersinergi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk pengelolaan ekspektasi. Koordinasi dalam pengendalian inflasi sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi sebesar $3,5 \pm 1\%$ pada 2019, serta $3,0 \pm 1\%$ pada 2020 dan 2021.

Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan pendalaman pasar keuangan guna meningkatkan peran pasar keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan ini, Bank Indonesia bersama OJK dan Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) telah menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) guna mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Selaras dengan SN-PPPK tersebut, kebijakan pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia 2018

difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi pasar uang dan pasar valas guna turut mendorong pembiayaan jangka panjang sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Salah satu strategi yang ditempuh ialah pengembangan instrumen untuk penguatan aktivitas penggunaan lindung nilai melalui pengaturan transaksi derivatif suku bunga Rupiah di pasar melalui IRS dan OIS. Pengembangan pasar derivatif di pasar valas juga ditempuh dengan penerapan transaksi DNDF dan pengembangan pasar *call spread option* (CSO). Bank Indonesia juga menyempurnakan *benchmark rate* di pasar uang Rupiah melalui pembentukan Indonesia *overnight index average* (IndONIA) dan penguatan *Jakarta interbank offered rate* (JIBOR).

Kebijakan pendalaman pasar keuangan juga ditempuh untuk mendukung pengembangan investasi jangka panjang di pasar modal. Selain itu, penguatan peran pasar keuangan turut ditempuh melalui perluasan inovasi instrumen untuk pembiayaan proyek infrastruktur melalui koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan sejumlah lembaga keuangan. Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan pembiayaan proyek infrastruktur strategis senilai 13,6 miliar dolar AS pada Oktober 2018.

Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, ditempuh melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan tersebut antara lain dengan melonggarkan rasio *loan to value* (LTV) untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi pembeli pertama dan untuk mendorong investasi di sektor perumahan. Bank Indonesia juga secara konsisten mendorong peningkatan akses keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penetapan target rasio kredit UMKM minimum sebesar 20% pada 2018 sesuai dengan penahapan yang telah ditetapkan sejak 2015.

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga ditempuh melalui ketentuan *loan to funding ratio* (LFR), yang kemudian disebut rasio intermediasi makroprudensial (RIM). Instrumen ini dikembangkan dengan memperluas pembiayaan ekonomi dari kredit ke arah pembelian surat-surat berharga berkualitas yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan. Bank

Indonesia juga memperkuat fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan melalui ketentuan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) yang merupakan penyempurnaan GWM Sekunder. Ketentuan PLM merupakan kewajiban pemenuhan GWM sekunder sebesar 4% dari DPK yang dipenuhi dalam bentuk kepemilikan surat-surat berharga dan dapat direpokan ke Bank Indonesia. Pada 2018, persentase jumlah surat berharga yang dapat direpokan ke Bank Indonesia ditingkatkan dari semula 2% dari DPK menjadi 4% dari DPK. Sementara itu, kebijakan permodalan dalam bentuk *countercyclical capital buffer* (CCB) dipertahankan pada level 0% untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan memitigasi risiko. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK dalam memperkuat surveilans terhadap sistem keuangan, terutama terhadap bank-bank besar dan korporasi, serta mempererat koordinasi baik melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun kerja sama di fora internasional.

Kebijakan sistem pembayaran turut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat strategi kebijakan sistem pembayaran baik di sisi nontunai maupun sisi tunai. Di sisi nontunai, Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program sosial pemerintah, pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah. Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital melalui implementasi gerbang pembayaran nasional (GPN) dan pengembangan ekosistem teknologi finansial (tekfin), terutama di bidang sistem pembayaran. Di sisi tunai, Bank Indonesia terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia. Di tengah upaya mendukung kegiatan ekonomi tersebut, Bank Indonesia juga tetap memastikan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan sistem pembayaran melalui pengendalian risiko dan perlindungan konsumen. Terakhir, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, maupun dalam koordinasi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pada 2018, di bidang moneter, sejumlah instrumen syariah telah diterbitkan seperti sukuk Bank Indonesia (SukBI), *negotiable certificate of deposits* (NCDs), dan instrumen lindung nilai berbasis syariah. Sementara itu, di bidang makroprudensial, relaksasi ketentuan RIM dan PLM syariah ditempuh bersamaan dengan ketentuan yang berlaku secara konvensional.

Pengembangan *core principles* untuk instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat infaq shodaqoh (ZIS) dan wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi juga diprakarsai oleh Bank Indonesia. Pengembangan rantai nilai halal ditempuh baik melalui pemberdayaan ekonomi pesantren maupun di sejumlah sektor dan komoditas seperti pariwisata, makanan, fesyen, dan UMKM. Penyelenggaraan festival ekonomi syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia *sharia economic festival* (ISEF) bertaraf internasional dilakukan secara rutin. Kegiatan tersebut ditujukan untuk edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi keuangan syariah dan gaya hidup halal.

Kebijakan fiskal ditempuh Pemerintah secara pruden dan diarahkan untuk menopang stabilitas perekonomian, dengan tetap mengoptimalkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan dengan upaya menopang stabilitas perekonomian, kebijakan fiskal 2018 diarahkan untuk tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal dengan mengelola keseimbangan primer dan defisit APBN secara keseluruhan. Pada 2018, keseimbangan primer tercatat -0,01% dari PDB (1,8 triliun Rupiah), turun signifikan dari capaian tahun sebelumnya sebesar -0,91% (124,4 triliun Rupiah). Perkembangan positif juga tergambar pada defisit APBN 2018 yang tercatat sebesar 1,8% dari PDB, turun dari kondisi 2017 sebesar 2,5% dari PDB. Perkembangan ini pada gilirannya dapat menjaga posisi utang pemerintah pada level yang aman yakni 29,8% dari PDB.

Di tengah strategi tersebut, Pemerintah tetap mengoptimalkan kebijakan fiskal 2018 menjadi instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ditempuh Pemerintah antara lain melalui peningkatan belanja bantuan sosial (bansos) sejak awal 2018. Selain

itu, untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah memberikan insentif pajak berupa *tax holiday* untuk industri pionir selama 5 hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya.

Strategi kebijakan fiskal didukung oleh peningkatan peran kebijakan fiskal daerah dan pembangunan proyek infratraktur. Upaya memperkuat peran fiskal daerah ditempuh melalui peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan mengedepankan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah dilaksanakan dengan mengedepankan strategi penguatan dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk mendorong belanja daerah yang lebih produktif.

Dalam kaitan dengan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan mendorong partisipasi swasta. Pembangunan infrastruktur 2018 menekankan pada percepatan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah Indonesia. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) telah melakukan seleksi daftar proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi, serta memberikan fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Proyek-proyek tersebut dimasukkan ke dalam kelompok proyek strategis nasional (PSN).

Pemerintah juga melanjutkan reformasi struktural untuk mendukung peningkatan kapasitas perekonomian. Reformasi struktural ditempuh melalui strategi peningkatan iklim kemudahan usaha dan investasi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Implementasi hal ini dititikberatkan pada perbaikan regulasi dan birokrasi yang diwujudkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 pada 2018. Paket ini secara khusus bertujuan untuk menarik modal asing dan investasi ke Indonesia. Pemerintah juga memangkas birokrasi perizinan dengan mengembangkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau disebut *online single submission* (OSS).

Pemerintah terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi era Industri 4.0. Kebijakan ditempuh dengan membentuk Badan Pengembangan SDM Industri yang akan menyusun

program untuk meningkatkan kompetensi SDM di sektor industri. Reformasi struktural juga diarahkan untuk mendorong peningkatan ekspor antara lain melalui penerbitan ketentuan mengenai percepatan perizinan kepabeanan dan cukai, termasuk penyederhanaan proses perizinan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Upaya mendorong peningkatan ekspor juga disertai langkah-langkah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor antara lain dengan memperluas program Biodiesel 20 (B20) yakni mandatori penggunaan campuran biodiesel pada minyak solar sebesar 20 persen. Di samping itu, Pemerintah mempercepat pengembangan sektor pariwisata untuk mendukung peningkatan ekspor jasa.

Perekonomian 2018 Tetap Kuat

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lainnya dapat mengawal perekonomian Indonesia melalui tahun 2018 dengan baik. Stabilitas perekonomian kembali terkendali pada triwulan IV 2018 dan momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

Perkembangan positif tergambar pada aliran masuk modal asing yang meningkat pada triwulan IV 2018. Data Institute of International Finance (IIF) menunjukkan aliran masuk modal asing ke Indonesia tercatat paling besar dibandingkan dengan yang terjadi di negara berkembang lainnya. Kondisi ini kemudian mendorong surplus TMF naik pada triwulan IV 2018 hingga mencapai 15,7 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan II dan III 2018.

Pada saat bersamaan, impor juga dalam tren melambat sejalan dampak positif berbagai kebijakan yang ditempuh. Total impor nonmigas pada triwulan IV 2018 tumbuh 12,5% (yoy), turun dibandingkan dengan kinerja triwulan III 2018 sebesar 21,3% (yoy). Namun, kontribusi perlambatan impor nonmigas terhadap upaya menurunkan transaksi berjalan menjadi terhambat karena pada saat bersamaan ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas dunia yang menurun. Dengan perkembangan ini, NPI pada triwulan IV 2018 mencatat surplus 5,4 miliar dolar AS, berbanding terbalik dari perkembangan triwulan sebelumnya yang mencatat defisit (Tabel 1).

Secara keseluruhan, tren perbaikan aliran modal asing dan impor pada triwulan IV 2018 berdampak positif pada ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan tetap berada dalam level yang sehat yakni tercatat 2,98% dari PDB, meskipun melebar dibandingkan dengan capaian pada 2017 sebesar 1,60% dari PDB. Beberapa indikator lain juga menunjukkan ketahanan eksternal yang tetap terjaga. Cadangan devisa pada akhir 2018 mencapai 120,7 miliar dolar AS, lebih dari cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta memadai untuk dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan pembalikan modal asing ke luar negeri. Ketahanan sektor eksternal juga ditopang *second line of defense* yang ditempuh melalui penguatan kerjasama internasional Bank Indonesia dengan bank sentral negara-negara di Asia Pasifik dalam kerangka jaring pengaman keuangan internasional (JPKI).

Perkembangan NPI yang membaik dan mencatat surplus pada triwulan IV 2018 mendorong nilai tukar Rupiah dalam tren menguat pada November – Desember 2018. Nilai tukar Rupiah menguat dari rata-rata Rp15.176 per dolar AS pada Oktober 2018 menjadi Rp14.661 per dolar AS dan Rp14.493 per dolar AS pada dua bulan terakhir 2018.

Dengan perkembangan tersebut dan sejalan dengan perkembangan global, secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2018 terdepresiasi 6,05%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2017, nilai tukar Rupiah tahun 2018 melemah 5,65% *point to point* (ptp). Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi beberapa mata uang lain seperti rupee India, rand Afrika Selatan, real Brasil, dan lira Turki. Dari aspek volatilitas, nilai tukar Rupiah juga rendah yakni 8,5%, lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas beberapa mata uang lain.

Di tengah gejolak sektor eksternal tersebut, inflasi 2018 tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Ditopang inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF) yang terjaga, serta inflasi *administered prices* (AP) yang rendah, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,13% dan berada dalam rentang sasaran 3,5±1%. Perkembangan ini juga menjadikan inflasi berturut-turut dalam 4 tahun terakhir berada dalam kisaran sasaran.

Tabel 1. Indikator Perekonomian Domestik

Komponen	2016	2017	2018				
			I	II	III	IV	Total
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	5,03	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17
Konsumsi Rumah Tangga (Persen,yoy)	5,01	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy)	-0,14	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
PMTB (Persen, yoy)	4,47	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
PMTB Bangunan (Persen, yoy)	5,18	6,24	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45
PMTB Non Bangunan (Persen, yoy)	2,43	5,90	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31
Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	-1,66	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	-2,41	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
Inflasi IHK (Persen, yoy)	3,02	3,61	3,40	3,12	2,88	3,13	3,13
Inflasi Inti (Persen, yoy)	3,07	2,95	2,67	2,72	2,82	3,07	3,07
Inflasi <i>Volatile Food</i> (Persen, yoy)	5,92	0,71	4,06	4,60	3,75	3,39	3,39
Inflasi <i>Administered Prices</i> (Persen, yoy)	0,21	8,70	5,11	2,88	2,40	3,36	3,36
Neraca Pembayaran Indonesia							
Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB)	1,82	1,60	2,07	3,01	3,28	3,57	2,98
Transaksi Modal dan Finansial (miliar dolar AS)	29,3	28,7	2,3	3,3	3,9	15,7	25,2
<i>Overall Balance</i> (miliar dolar AS)	12,1	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	116,4	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per dolar AS)	13.305	13.385	13.576	13.952	14.601	14.798	14.246
IHSG (Indeks)	5.297	6.356	6.189	5.799	5.977	6.056	6.056
Yield SUN 10 Tahun (Persen)	7,9	6,3	6,7	7,7	8,1	8,0	8,0
Perbankan							
Kredit Total (Persen, yoy)	7,9	8,2	8,5	10,7	12,7	11,8	11,8
CAR (akhir periode, Persen)	22,7	23,0	22,5	22,0	22,9	22,9	22,9
NPL (akhir periode, Persen)	2,9	2,6	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4
APBN							
Pajak (Persen PDB)	10,4	9,9	1,7	2,7	2,5	3,4	10,3
Keseimbangan Primer (Persen PDB)	-1,0	-0,9	-0,16	0,25	-0,10	0,00	-0,01
Defisit APBN (Persen PDB)	2,5	2,5	0,6	0,1	0,6	0,4	1,8

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI.

Perkembangan inflasi yang dalam tren menurun tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siklikal, tetapi juga oleh faktor struktural. Satu sisi, faktor siklikal seperti harga komoditas pangan global yang menurun dan permintaan yang terkendali mempengaruhi tekanan inflasi yang terus menurun. Sisi lain, perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia juga berpengaruh positif dan menimbulkan dampak permanen pada inflasi yang makin rendah. Faktor struktural tersebut terkait kebijakan moneter yang konsisten, struktur pasar yang makin kompetitif dan informasi pasar yang makin baik, serta distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang makin erat juga berkontribusi pada perbaikan karakter inflasi tersebut. Perbaikan struktur inflasi pada gilirannya mempengaruhi perilaku inflasi seperti ekspektasi yang semakin rendah, dampak lanjutan kenaikan inflasi VF dan

AP terhadap inflasi inti yang makin rendah, serta dampak pelemahan kurs terhadap inflasi yang menurun.

Stabilitas sistem keuangan juga terkendali ditopang permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang cukup. Rasio permodalan perbankan tetap tinggi dengan *capital adequacy ratio* (CAR) perbankan yang mencapai 22,9% pada akhir 2018. Likuiditas perbankan juga terjaga sepanjang 2018 yang tercemin dari rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 19,3%. Penempatan bank pada instrumen operasi moneter juga meningkat kembali, sehingga pada akhir 2018 tercatat 382,8 triliun Rupiah.

Sejalan dengan hal itu, penyaluran kredit juga meningkat dan risiko kredit terkendali. Fungsi intermediasi terus menunjukkan peningkatan yang terlihat dari pertumbuhan

kredit naik menjadi 11,8% pada 2018. Di tengah pertumbuhan kredit yang membaik, risiko kredit terkelola dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang tetap rendah yakni 2,4% (*gross*) atau 1,0% (*nett*) dan berada pada level sehat di bawah 5%. Sementara itu, penerbitan saham (IPO dan *rights issue*), obligasi korporasi, *medium term notes* (MTN), dan NCDs sebagai pembiayaan dari pasar modal tercatat sebesar 168,1 triliun Rupiah (*gross*). Hal itu menunjukkan pembiayaan korporasi dari sumber-sumber domestik baik dari perbankan maupun pasar modal makin baik.

Daya tahan ekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 tercatat 5,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dipengaruhi konsumsi dan investasi yang tumbuh tinggi melalui pembangunan proyek infrastruktur yang berlanjut. Sementara itu, kontribusi ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi tingginya pertumbuhan impor dan menurunnya pertumbuhan ekspor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada 2018 ditopang terutama oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku-Papua. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja LU yang terkait dengan permintaan domestik yang tumbuh kuat dan ekspor komoditas pertambangan.

Tiga Pelajaran Penting 2018

Dinamika perekonomian domestik 2018 setidaknya mengangkat tiga pelajaran penting untuk penguatan ketahanan ekonomi ke depan. Pelajaran pertama yaitu stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Sejarah ekonomi menunjukkan periode *boom* dan *bust* memiliki keterkaitan erat dengan kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal, naik-turunnya kinerja ekspor sejalan dengan siklus harga komoditas, atau tidak terkendalinya perkembangan sektor properti dan utang luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan inflasi yang tetap terjaga pada tingkat rendah dan stabil, nilai tukar Rupiah yang stabil, defisit

fiskal yang rendah, dan stabilitas sistem keuangan yang terpelihara. Selain itu, defisit transaksi berjalan perlu dikendalikan ke dalam batas yang aman yakni di bawah 3% dari PDB.

Pelajaran kedua yaitu daya saing dan produktivitas perlu terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, struktur ekspor perlu diperkuat dengan meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap gejolak siklikal. Pelemahan kinerja ekspor pada 2018 tidak terlepas dari gejolak siklikal global tersebut.

Untuk itu, perlu penguatan manufaktur dan pariwisata, peningkatan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor, serta penguatan upaya untuk mendorong lebih banyak investasi langsung baik dari domestik maupun luar negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional juga perlu terus didorong melalui hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Industri manufaktur seperti otomotif, elektronika, tekstil, baja, dan kimia perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan rantai pasok global.

Pelajaran ketiga yaitu sinergi bauran kebijakan antar otoritas menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan akan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan reformasi struktural di sektor riil perlu terus diperluas dan dipercepat. Reformasi struktural ini akan menjadi aspek penentu dalam upaya peningkatan daya saing, produktivitas, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum.

Akselerasi efisiensi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, dan penerapan program perizinan terintegrasi atau OSS perlu terus diupayakan guna peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur terutama terkait konektivitas perlu terus diperluas dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.

Prospek Perekonomian Tetap Baik

Ke depan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik, meskipun perekonomian global yang belum kondusif perlu terus dicermati. Di tengah prospek ekonomi global yang akan melandai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,0%-5,4%. Prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, baik bersumber dari konsumsi maupun investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tinggi sejalan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat. Hal tersebut ditopang oleh inflasi yang terjaga, peningkatan penyaluran bansos, serta konsumsi untuk keperluan logistik terkait Pemilihan Presiden/ Pemilihan Legislatif. Sementara itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan investasi nonbangunan dan berlanjutnya proyek infrastruktur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditunjang ekspor neto yang membaik seiring dengan melambatnya pertumbuhan impor.

Ketahanan eksternal semakin baik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan aliran masuk modal asing. Defisit transaksi berjalan diperkirakan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB pada 2019. Penurunan defisit transaksi berjalan ditunjang oleh berbagai langkah pengendalian impor seperti penerapan program B20. Pada saat yang bersamaan, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor terutama produk manufaktur dan jasa pariwisata diperkirakan mulai memberikan hasil positif. Sementara itu, kenaikan aliran masuk modal asing didorong daya tarik aset keuangan domestik yang tetap tinggi dan ketidakpastian global yang berkurang. Dengan prakiraan ini, surplus TMF diperkirakan mengalami perbaikan dan lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Surplus tersebut terutama ditopang oleh aliran investasi langsung yang meningkat seiring dengan perbaikan iklim usaha dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik. Investasi portofolio diperkirakan membaik seiring ketidakpastian di pasar keuangan global yang berkurang.

Inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi $3,5 \pm 1\%$ pada 2019. Prospek inflasi

yang tetap terkendali akan ditopang oleh inflasi inti yang terjaga seiring tekanan dari sisi permintaan yang dapat direspons oleh sisi produksi secara memadai, ekspektasi inflasi yang terjangkau, dan nilai tukar Rupiah yang terkendali. Berbagai upaya Pemerintah yang berkelanjutan untuk menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi, disertai koordinasi pengendalian inflasi yang kuat juga akan berdampak positif bagi inflasi VF yang tetap terjaga. Di samping itu, inflasi AP diperkirakan tetap terjaga dengan minimalnya kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis. Perkembangan inflasi yang akan terkendali juga dipengaruhi oleh perbaikan perilaku inflasi seperti dampak depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap inflasi yang minimal, serta dampak lanjutan dari penerapan kebijakan AP terhadap komoditas lainnya yang mengecil.

Stabilitas sistem keuangan membaik dengan risiko yang terjaga. Risiko kredit tetap terkelola dengan baik diikuti dengan pertumbuhan kredit perbankan yang meningkat. Kredit diperkirakan tumbuh pada kisaran 10%-12%, sementara DPK perbankan diperkirakan tumbuh pada kisaran 8%-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pembiayaan dari sisi nonbank juga diperkirakan membaik sejalan dengan pasar keuangan domestik yang makin berkembang.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi dalam kisaran 5,5%-6,1% pada 2024. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan modal manusia, dan serangkaian deregulasi yang telah ditempuh akan meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, ketahanan eksternal semakin baik tergambar pada defisit transaksi berjalan yang terus menurun dan stabilitas makroekonomi makin baik tercermin pada inflasi yang makin rendah. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang bertambahnya sumber pembiayaan. Sejalan prospek jangka menengah ini, pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat dan menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.

Arah Kebijakan ke Depan

Prospek ekonomi Indonesia yang baik ditopang semakin solidnya sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait dalam satu bauran kebijakan ekonomi yang saling memperkuat. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diarahkan pada stabilitas makroekonomi, dengan memanfaatkan ruang yang tersedia untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan yang erat antara Kementerian keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam KSSK, termasuk dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Bank Indonesia akan terus menempuh bauran kebijakan guna memperkuat stabilitas eksternal dan juga mendukung upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan tersebut ditempuh melalui kebijakan moneter, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Bauran kebijakan ditopang dengan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan tetap menempuh kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *ahead of the curve* pada 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi, baik domestik maupun global, sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah akan ditempuh dengan terus mendorong peningkatan efisiensi mekanisme pasar, didukung strategi intervensi ganda bila diperlukan dan inisiatif pendalaman pasar keuangan. Kecukupan cadangan devisa akan tetap dijaga, serta didukung oleh penguatan kerja sama JPPI, baik di tataran bilateral, regional maupun multilateral. Selain itu, kerja sama juga akan diperluas dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi bilateral di kawasan.

Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sehingga dapat menopang stabilitas di pasar uang dan bila memungkinkan juga memfasilitasi pembiayaan

ekonomi. Upaya ini ditempuh baik melalui operasi moneter maupun asesmen yang berkelanjutan terhadap kecukupan likuiditas di pasar uang dan perekonomian. Bank Indonesia akan bersinergi dengan OJK untuk memastikan kecukupan likuiditas hingga tingkat perbankan.

Bank Indonesia juga akan meningkatkan akselerasi pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan ekonomi secara lebih luas dan stabilitas di pasar uang. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas, Bank Indonesia akan terus mendorong kenaikan volume transaksi dan penggunaan instrumen *spot*, *swap*, dan *DNDF* guna meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* dalam penentuan nilai tukar Rupiah sesuai mekanisme pasar di pasar valas. Sementara di pasar uang, volume transaksi dan penggunaan instrumen *repo* dan *IRS* terus dikembangkan untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi dan *market conduct* di pasar uang antar bank dalam pembentukan kurva imbal hasil di berbagai tenor.

Pendalaman pasar keuangan juga akan diperkuat melalui penerbitan regulasi *market operator* serta pengembangan infrastruktur *electronic trading platform (ETP)*, *trade repository*, dan pendirian *central counterparty (CCP)* untuk transaksi derivatif. Selain itu, Bank Indonesia juga akan berpartisipasi aktif dalam pengembangan berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini, koordinasi kebijakan akan dilanjutkan antara lain melalui FK-PPPK antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK.

Bank Indonesia akan melanjutkan arah kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial akan ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan serta sekaligus memperluas pendanaan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga.

Kebijakan makroprudensial akomodatif juga ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor prioritas, antara lain ekspor dan pariwisata. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyempurnaan rasio pembiayaan

UMKM dan pengembangan rasio pembiayaan sektor prioritas. Ketentuan PLM akan dipantau agar mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan. Selain itu, upaya menjaga ketahanan sistem keuangan diperkuat antara lain melalui surveilans terhadap bank besar dan korporasi yang sistemik, terutama di sektor komoditas primer, properti, dan memiliki utang luar negeri yang tinggi.

Bank Indonesia melanjutkan peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung kegiatan ekonomi. Strategi untuk mendukung kegiatan ekonomi ditempuh dengan terus memperluas program elektronifikasi untuk penyaluran bansos secara nontunai, pembayaran nontunai di sektor transportasi, serta dukungan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah. Dari sisi tunai, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kualitas uang Rupiah yang beredar dan mengoptimalkan distribusi uang yang menjangkau berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Sejalan dengan arah kebijakan sistem pembayaran ini, Bank Indonesia juga terus mengembangkan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai dari sisi nilai besar (*wholesale*) dan ritel. Infrastruktur sistem pembayaran untuk transaksi nilai besar terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi transaksi *cross-border*, sehingga mendorong kapabilitas industri untuk memproses transaksi yang lebih luas. Sementara itu, upaya untuk mendorong industri dari sisi ritel dilakukan melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran dalam rangka mendukung efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital. Penguatan infrastruktur GPN akan terus dilakukan melalui perluasan fasilitas interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, standardisasi *Quick Response (QR)-Code* oleh Bank Indonesia, dan *online payment*. Kebijakan juga diperkuat melalui koordinasi dengan OJK untuk perluasan program elektronifikasi dan pengembangan tekfin. Sinergi pengembangan tekfin akan ditempuh melalui pengembangan *e-commerce* dan *start-up* untuk mendorong UMKM.

Bank Indonesia juga terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga di tingkat daerah untuk mendorong berkembangnya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah akan didorong melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, serta perluasan instrumen keuangan syariah. Peningkatan kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren terus dilakukan melalui berbagai *linkage* usaha antarpesantren, termasuk melalui pengembangan pasar *e-commerce*.

Bank Indonesia juga aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk, terutama untuk pembangunan infrastruktur, serta integrasi keuangan sosial dan komersial syariah, seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif. Bank Indonesia juga akan terus mengampunahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penyelenggaraan FeSyar di berbagai daerah dan ISEF bertaraf internasional.

Bank Indonesia akan memperluas program-program pengembangan UMKM dan memfokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Pengembangan klaster UMKM untuk komoditas pangan strategis, antara lain, beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi, di berbagai daerah akan diperluas guna mendukung pengendalian inflasi. Pengembangan juga akan dilakukan pada klaster UMKM di bidang kerajinan seperti batik dan industri rumah tangga sesuai dengan keunikan budaya daerah.

Demikian juga dengan klaster UMKM di sektor pertanian, seperti kopi, dan bidang fesyen akan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk ekspor dan pariwisata. Selain itu, UMKM akan dikembangkan dalam bentuk UMKM *go digital* dan berintegrasi dengan usaha syariah. Melalui berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional yang secara rutin diselenggarakan oleh Bank Indonesia, UMKM dapat meningkatkan skala usaha. Dalam kesempatan tersebut, UMKM akan dapat menjalin hubungan bisnis dengan mitra perbankan dan dunia usaha, serta meningkatkan ekspor, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya untuk mempercepat reformasi struktural guna memastikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan yang erat dilakukan dalam kerangka bauran kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat koordinasi kebijakan Bank Indonesia, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Pengendalian inflasi melalui koordinasi TPIP dan TPID akan difokuskan pada strategi 4K (keterjangkauan

harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah antara lain melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat-Daerah (Rakorpusda) yang difokuskan pada penurunan defisit transaksi berjalan. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, serta pengembangan ekonomi keuangan digital untuk memperbaiki struktur perekonomian. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis melalui kerangka KSSK yang diselenggarakan secara periodik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari Pemerintah, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk tetap menopang stabilitas perekonomian, dengan tetap mengoptimalkan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk menopang stabilitas perekonomian, Pemerintah fokus menjaga prospek kesinambungan fiskal dengan mengelola keseimbangan primer dan defisit APBN secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer dan defisit pada APBN 2019 masing-masing sebesar -0,12% dan 1,84% dari PDB.

Upaya memperkuat prospek kesinambungan fiskal juga dilakukan dari aspek pembiayaan defisit melalui penggabungan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan kreatif, dengan mengutamakan risiko dan biaya yang paling efisien. Sementara itu, upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ditempuh Pemerintah melalui optimalisasi komponen belanja dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Stimulus perekonomian melalui belanja negara dititikberatkan pada program peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, penyelesaian infrastruktur dan penguatan fiskal daerah.

Pemerintah juga akan secara konsisten melanjutkan reformasi struktural untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif. Kebijakan reformasi struktural dapat diarahkan kepada empat strategi utama. Pertama, strategi meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan empat elemen dasar yakni ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia (*human capital*), adopsi teknologi,

dan dukungan kelembagaan (Diagram 2). Dalam hal ketersediaan infrastruktur, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan daya dukung infrastruktur, termasuk untuk meningkatkan konektivitas dan penyediaan energi.

Kedua, strategi untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam. Pengembangan industri juga diarahkan untuk lebih berperan di dalam rantai pasok global. Ketiga, strategi mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital sehingga dapat mendukung upaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian dalam jangka menengah. Terakhir, strategi untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi, baik melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan maupun berbagai inovasi lainnya.

Sejalan dengan upaya reformasi struktural ini, Pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kinerja pariwisata yang terus berada dalam tren yang meningkat menunjukkan peluang bagi daerah untuk mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi destinasi pariwisata. Pengembangan pariwisata akan turut mendukung penerimaan devisa, sehingga dapat memperkuat neraca jasa. Pengembangan pariwisata di daerah juga akan disinergikan dengan pengembangan layanan pembayaran nontunai untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan di daerah.

Diagram 2. Elemen Struktural Domestik





